

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deleuze & Guattari (1997: 245) mengungkapkan, bahwa Globalisasi dengan sistem kapitalisme dan ideologi yang melandasinya, di mana pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai panglima, perdagangan bebas sebagai bahan bakar pertumbuhan, pasar bebas yang tanpa hambatan, dan pentingnya budaya konsumerisme ternyata tidak lebih hanya menciptakan budaya tunggal (*monoculture*)—homogenisasi budaya, gaya hidup, manajemen dan teknologi yang mencabut tradisi dan ekonomi-ekonomi lokal.

Salah satu wacana dominan era globalisasi adalah hipotesis tentang “homogenisasi budaya”. Hal ini menurut Hannerz (1990: 250) bahwa proses perubahan global yang didukung oleh pengetahuan dan media teknologi akan melahirkan budaya dunia yang homogen. Pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya pengalaman dan pemahaman generasi muda terhadap keragaman budayanya. Pada aspek inilah kemudian Maira (2004: 202) mengingatkan, kehidupan anak-anak dewasa ini dibentuk oleh proses globalisasi perekonomian dan budaya. Untuk itu menurutnya, sistem pendidikan yang terikat pada kearifan lokal secara proaktif dapat menghadapi tantangan globalisasi.

Kemajuan di bidang teknologi yang telah mengglobal mengakibatkan hilangnya sekat-sekat antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya, begitu pula antara Negara yang satu dengan Negara lainnya. Dalam pandangan para pemikir seperti Drucker

(1993), Soros (1998), dan Ohmae (2005) bahwa globalisasi telah melahirkan suatu era “*countries without borders*”. Appadurai (1993: 129-157), Lull (1998), dan Piliang (2006) menyatakan bahwa telah terjadi arus global bagi manusia (*ethnoscape*), teknologi (*technoscape*), uang atau modal (*finanscape*), dan idea (*ideoscape*).

Budaya global berimplikasi pada perkembangan kehidupan masyarakat suatu bangsa, seperti yang dikatakan oleh Piliang (2004: 274), lewat berbagai teknologi (teknologi informasi, telekomunikasi, televisi, internet); berbagai agen (kapitalis, produser, artis); dan berbagai produknya (barang, tontonan, hiburan). Budaya global tidak henti-hentinya melancarkan gelombang serangan terhadap kehidupan masyarakat yang sampai pada satu titik, masyarakat menerima berbagai perubahan cara hidup, gaya hidup (*lifestyle*), bahkan pandangan hidup (*worldview*) yang mengancam eksistensi berbagai bentuk warisan adat, kebiasaan, nilai, identitas, dan simbol-simbol yang berasal dari budaya lokal.

Indonesia sebagai bagian dari kampung global, juga mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah melemahnya kekuatan integrasi dan nasionalisme atau kesadaran dan kebanggaan akan identitas bersama sebagai satu *nation*. Berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, seperti yang disinyalir oleh Abdullah (2006: 32-37) adalah semakin menguatnya persoalan mayoritas-minoritas atau merebaknya konflik-konflik yang bersumber dari “pluralisme sempit” masyarakat itu sendiri. Suastika (2008: 142) menandai kecenderungan ini dengan munculnya bentuk *exclusivity*, *mutual distrust*, dan *inequality frustration*. Kasus kerusuhan berbau SARA seperti di Maluku, Poso, Papua, Konflik Aceh, dan perang antar kampung, merupakan contoh empirik yang dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural*), terjadinya konflik dalam hubungan atau interaksi antar etnik sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan–kesatuan sosial yang terkait ke dalam ikatan–ikatan primordial dengan sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain sering menimbulkan konflik di antara kesatuan–kesatuan sosial tersebut. Sumber–sumber untuk konflik antara suku bangsa atau golongan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, menurut Ranjabar (2006: 194-195) paling tidak ada lima jenis konflik, satu di antaranya adalah konflik terjadi jika warga dari satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa yang lain secara ideologis. Pada tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebut berwujud di dalam bentuk konflik antar sistem nilai yang dianut. Contoh: konflik yang pernah terjadi tahun 1999-2002 di Maluku, Kupang, Mataram, dan Poso.

Konflik itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari proses perubahan sosial. Oleh sebab itu, teori konflik memandang bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan–pertentangan yang terus menerus di antara unsur–unsurnya (Ritzer, 20007: 26). Menurut Harris dan Reilly (2000: 11-12), bentuk–bentuk konflik yang terjadi, baik konflik di dalam negara atau di luar wilayah negara, yang sering terjadi tergabung dalam dua elemen kuat. Elemen yang *pertama* adalah masalah identitas, yaitu mobilisasi orang–orang dalam kelompok–kelompok identitas komunal yang didasarkan pada ras, agama, kultur, bahasa, dan lain–lain. *Kedua* adalah masalah distribusi, yaitu cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (misalnya suatu kelompok agama kekurangan sumberdaya tertentu yang didapat kelompok lain), maka melahirkan potensi konflik. Demikian pula dengan Ahimsa (1999: 167) bahwa sistem sosial yang

majemuk (*plural*) yang memungkinkan majemuknya kategori status, organisasi, dan pelapisan sosial akan mudah melahirkan perselisihan atau konflik di dalam masyarakat.

Menurut Nasikun (2009: 34) bahwa struktur masyarakat Indonesia di tandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu: *pertama* secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa (etnik), perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan; dan *kedua* secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Blau (1977: 98-251) menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara komunitas tersebut (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkatan ketidaksamaan atau keberagaman antar bagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antar bagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama. Blau kemudian mengelompokkan basis parameter pembedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Dalam parameter nominal, komunitas dikelompokkan menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, dan sebagainya. Sementara parameter gradual, komunitas dikelompokkan ke dalam kelompok sosial atas dasar peringkat status yang menciptakan perbedaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, seperti: pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kewibawaan, inteligensia, dan sebagainya.

Dijelaskan oleh Lubis (2006: 23), manusia adalah makhluk sosial (*social being, zoon politicon, madaniyy bi al-thab*), merupakan instink dasar bagi anak cucu Adam-Hawa yang dalam kehidupannya memerlukan orang lain. Hubungan seseorang individu dengan manusia lainnya membentuk jaringan yang berlapis dan tumpang tindih. Seseorang merupakan bagian dari keluarga inti (*nuclear family*), anggota keluarga besar (*extended family*), kelompok marga, klub olahraga, asosiasi profesi, warga kampung, kelompok hobbi, pelanggan listrik, anggota partai politik, pemirsa televisi, anak Medan, warga Sumatera Utara, bangsa Indonesia, anggota agama samawi, bagian dari negara berkembang, dan lain-lain.

Untuk membangun solidaritas sosial antar komunitas, Nasikun (2009: 36-72) mengatakan paling tidak ada dua pendekatan atau perspektif yang dapat digunakan, yaitu:

Perspektif sistem sosial dan sistem budaya. Perspektif sistem sosial, yaitu melalui *inter-group relation*, yang dimaksudkan sebagai hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok. Makin intensif hubungan antar kelompok, makin tinggi pula tingkat integrasi di antara mereka. Dengan adanya *inter-group relation* dapat pula menetralkan konflik-konflik di antara kelompok, dan kekhawatiran akan terjadinya fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralkan karena loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Perspektif sistem budaya, yaitu masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai umum tersebut berlaku bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multikultur yang menjadi acuan perilaku yang terpola.

Dikatakan oleh Sztompka (2007: 9-11), masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem yang kaku atau “keras”, melainkan dipandang sebagai antar hubungan yang “lunak”. Realitas sosial adalah realitas hubungan antar individu, segala hal yang

ada di antara individu manusia, jaringan hubungan ikatan, ketergantungan, pertukaran, dan kesetiakawanan sosial. Dengan kata lain, realitas sosial adalah jaringan sosial khusus atau jaringan sosial yang mengikat orang-orang menjadi suatu kehidupan bersama. Jaringan sosial ini terus berubah, mengembang dan mengerut, menguat dan melemah, bersatu dan terpecah-belah, penggabungan atau pemisahan diri dari unsur lain.

Menurut Lubis (2006: 24), setiap manusia mesti mempelajari kultur masyarakatnya. Di antara unsur budaya yang paling signifikan yang harus dipelajari seseorang adalah nilai (*value*), norma (*norms*), dan peranan (*roles*). Nilai-nilai dalam sebuah kultur yang dianggap ideal harus memiliki tujuan untuk memastikan baik dan buruk atau yang disukai dan yang dibenci. Norma sebaliknya, merupakan kaidah yang mengatur perilaku (*rules governing behavior*). Norma menetapkan perilaku yang diperlukan, yang dapat diterima, atau yang dilarang dalam keadaan tertentu, yang seharusnya, seyogyanya, atau semestinya (dilakukan atau tidak dilakukan). Sedangkan peranan (*role*) adalah kumpulan norma yang terkait dengan kedudukan tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam setiap situasi sosial, manusia memiliki peranan yang relatif jelas untuk dijalankan (mahasiswa, teman, perempuan, suami, istri, pejalan kaki, polisi, perawat, dan lain-lain). Lanjut Lubis bahwa:

Setiap orang dalam suatu kelompok etnik dan budaya menyadari cara hidup dan adat-istiadat warisan leluhur sedang terancam oleh masuknya gelombang budaya asing dan kelompok etnik luar, maka banyak pihak dari kelompok etnik yang terancam tersebut bersikap dan berperilaku *nativism* (upaya keras dan menyeluruh untuk melestarikan), bahkan menghidupkan kembali budaya leluhurnya, terutama dalam masyarakat yang multikultur yang memiliki nilai-nilai budaya yang beragam.

Menurut Darajat (1984: 260) bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada

pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku. Sutrisno (2005: 67) mengatakan nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok orang, serta dijadikan acuan tindakan maupun pemberi arti arah hidup. Nilai ditumbuhkan dan ditanamkan dalam diri seseorang, sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari hidupnya yang harus dijaga dan dipelihara, serta untuk menjadi pemandu jalan hidup

Hans (2005: 10) mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada wujud tingkahlakunya yang unik. Magnis-Suseno (1987: 14) mengatakan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Semanara Maksum dan Luluk (2004: 25) mengungkapkan bahwa definisi nilai memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya. Implikasi yang dimaksud adalah: (1) nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses logis dan rasional dan proses ketertarikan atau penolakan menurut kata hati; (2) apabila berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara yang unik oleh individu atau kelompok.

Dalam realitas kehidupan sosial yang multikultural seperti Indonesia, setiap elemen masyarakat memiliki "*system of beliefs*" yang beragam sesuai dengan karakteristik sosiologis masing-masing. Perbedaan sistem nilai yang dimiliki masing-masing tradisi akan membawa pada situasi di mana mereka saling berhadap-hadapan, bahkan tidak jarang harus berakhir dengan konflik, karena ada hal-hal yang secara fundamental tidak dapat dikompromikan (Hamim, *et al.*, 2007: 33). Menurut Koentjaraningrat (1974: 32), sistem nilai budaya merupakan nilai yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dari alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat, mengenai hal-hal yang di anggap amat

bernilai dalam hidup. Karena itu, sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Mc.Guire (1984: 24) mengatakan bahwa secara pribadi, manusia memiliki bentuk sistem nilai. Sistem nilai ini dibentuk melalui hasil belajar dan proses sosialisasi. Perangkat sistem nilai itu sendiri dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi pendidikan, dan masyarakat luas, serta sistem nilai ini merupakan sesuatu yang bermakna bagi diri seseorang dalam masyarakat multikultur.

Istilah multikultural pada hubungan antar etnik belum sepenuhnya dipahami sebagai sesuatu yang *given* sebagai Taqdir Allah. Dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an: "*Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal* (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa: *pertama*, Allah menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan. Dari perbedaan tersebut melahirkan keturunan yang berbeda-beda pula. Dari perbedaan ini, menjadikan manusia mampu membentuk suku-suku menjadi bangsa-bangsa yang berbeda (Maslikhah, 2007: 1) untuk saling mengenal dan menjalin hubungan; *kedua*, bahwa kemultikulturalan itu ada sejak dihidirkannya manusia oleh Allah ke bumi ini, jika dilihat dari konsep "*litaarafu*" saling kenal-mengenal, yang berdimensi kasih sayang dan persaudaraan. Pada konteks "*litaarafu*" ini, manusia disertai tugas mengemban misi nilai-nilai multikultural bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Manusia dalam hal ini, tidak hanya dituntut toleran terhadap pluralitas dan perbedaan, tetapi menghendaki pula sikap saling memahami (*mutual understanding*) dan saling menghargai (*mutual respect*) terhadap komitmen berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tersebut, seperti yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dalam pembentukan negara dengan berbagai suku bangsa, di mana para *founding fathers* menghendaki

pengelolaan negara berdasarkan keanekaragaman tersebut dengan latar Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu juga). Namun menurut Wiriaatmadja (2002) bahwa keragaman dalam kesatuan ini pada paruh lima dekade dalam perjalanan negara-bangsa, lebih ditekankan pada aspek kesamaan dan kesatuannya yang mengakibatkan pengikisan secara kuantitas dan budaya lokal yang makin mundur dan kehilangan daya gunanya secara pragmatik.

Budaya lokal yang menjadi pembingkai kekuatan lokal seakan dilupakan oleh masyarakat terutama generasi muda, dan tergantikan oleh budaya-budaya global. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial jika masyarakat tidak siap atau tidak memiliki kemampuan untuk menangkalnya. Di samping itu, jika antar generasi tidak memiliki kesepahaman dalam mengejawantahkan nilai-nilai lokal yang telah mengintegrasikan masyarakat, terutama pada masyarakat yang memiliki komunitas etnik, dengan agama dan budaya yang beragam. Hal ini seperti dikatakan oleh Muhaimin (2003: 58), terjadinya berbagai masalah sosial bukan hanya merambah pada hubungan antar etnik, tetapi antar umat beragama, dan bahkan dalam wilayah interen umat beragama.

Di Kota Ternate dalam hubungan antar etnik, terdapat dua hal yang sering memicu timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam masyarakat, yakni: *pertama*, dalam setiap pemilihan kepala daerah sering melahirkan konflik antar etnik dengan berbagai kepentingan, karena kehidupan masyarakatnya berdasarkan kelompok-kelompok etnik. Ada etnik Bugis-Makassar yang memiliki komunitas tersendiri di Bastiong Ternate Selatan; kemudian etnik Arab yang terkonsentrasi di dua komunitas, yakni Falajawa 1 Kota Ternate Utara dan Falajawa 2 Kota Ternate Selatan; etnik China yang terkonsentrasi di Gamalam Kota Ternate yang jumlahnya sudah mengalami penurunan sejak kerusuhan 1999, karena sebagian besar eksodus ke luar

Maluku Utara (Jawa dan Manado); etnik Gorontalo yang terkonsentrasi di Lelong Kampung Makassar Pantai Ternate Utara; dan kemudian Etnik Buton yang terkonsentrasi di Koloncucu dan Kasturian Kota Ternate Utara. Sementara etnik lokal yang berasal dari semua daerah di Maluku Utara tersebar di beberapa wilayah di Kota Ternate: Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Utara, Pulau Ternate, dan Pulau Moti.

Kedua, masyarakat telah mengalami perubahan orientasi nilai-nilai dari yang tradisional ke modern. Belum lagi dihadapkan pada arus urbanisasi antar daerah dan antar provinsi di Indonesia yang tidak dapat dikendalikan. Kehadiran masyarakat urban di Kota Ternate Maluku Utara, di satu sisi menjadi penggerak pembangunan ekonomi dan perubahan sosial karena sebagian besar bergerak di bidang perdagangan. Di sisi lain kehadiran masyarakat urban membawa serta nilai-nilai sosial budaya (*cultural values*) yang dianut secara turun temurun di daerah asal. Nilai-nilai tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap nilai-nilai lokal daerah tujuan. Akumulasi bertemunya nilai-nilai sosial yang di bawa oleh masyarakat urban dengan nilai-nilai sosial masyarakat lokal, sesungguhnya memperkaya keragaman etnik dan nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik pada komunitas di Kota Ternate, tetapi juga menyimpan berbagai masalah sosial dan ancaman bagi kelangsungan hidup jika tidak dikelola dengan baik.

Sebelum konflik tahun 1999, kehidupan masyarakat di Kota Ternate sangat harmonis, pola hubungan masyarakat antara satu dengan yang lainnya begitu kental dengan nuansa persaudaraan, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebelum konflik, di antaranya nilai-nilai ketaatan, persaudaraan, toleransi, gotongroyong, dan sopan santun yang tertuang dalam "*adat se atorang*". Semua nilai-nilai ini telah berakar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pengikat keakraban serta persaudaraan pada komunitas di

Kota Ternate. Nilai-nilai seperti yang disebutkan, mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat, yaitu dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, kekerabatan antar anggota masyarakat terjalin dengan baik, sehingga terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Namun setelah pasca reformasi tahun 1998 kondisi masyarakat bukan menjadi baik dan beradab tetapi sering menimbulkan banyak masalah, seperti konflik antar agama dan konflik antar etnik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lokal (Yanuarti, *et. al.*, 2005; Yusuf, 2001; Rozi, 2006), bahwa akar penyebab konflik yang memicu renggangnya hubungan antar etnik di Maluku Utara seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumberdaya alam, serta pertikaian elit politik dan birokrasi merupakan faktor-faktor yang dibungkus “konflik agama”, baik dalam konteks nasional maupun lokal yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Dalam konteks lokal, setidaknya ada dua faktor penting yang mendasari konflik di Maluku Utara, yaitu: 1) rivalitas elit dalam merebut akses terhadap sumberdaya alam dan jabatan-jabatan birokrasi serta politik; 2) menguatnya etnosentrisme sebagai alat untuk merebut sumber-sumber ekonomi dan politik tersebut.

Kondisi sosial masyarakat setelah konflik dan pemekaran kabupaten-kabupaten dan kota di Maluku Utara menurut Hoemah (2005: 61) terjadi pula sentimen etnik yang menguat. Pada saat pemerintah provinsi membentuk perangkat pemerintah di daerah kabupaten-kabupaten dan kota hasil pemekaran, muncul berbagai reaksi masyarakat jika penunjukkan pejabat Bupati oleh Gubernur bukan putra daerah. Bahkan pada kabupaten tertentu reaksi negatif muncul pada tataran “*clan*” dan “*marga*”, jika bupati bukan dari clan dan marga etnik yang bersangkutan, maka pejabat tersebut akan ditolak atau tidak diterima masyarakat. Di bidang birokrasi

pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota terjadi “*ethnocentrisme*” dalam rekrutmen aparat dengan kapling-kapling etnik. Kabupaten Halmahera Utara misalnya, menjadi “tidak dibolehkan” bagi etnik tertentu, Kabupaten Halmahera Selatan atau Kota Tidore, terlarang bagi kelompok etnik tertentu yang begitu menguat dan dianggap wajar. Lanjut Hoemah, Pengkaplingan seperti ini membawa Maluku Utara dan khususnya Kota Ternate pada kondisi yang selalu rawan konflik yang berlatar etnik, karena para pejabatnya menjalankan kebijakan politik peminggiran terhadap wilayah dan etnik.

Selain fakta yang telah diuraikan di atas, penelitian ini didukung pula oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik, resolusi konflik, multikulturalisme, dan pendidikan multikultur di antaranya: penelitian yang dilakukan Jusan Yusuf, untuk penulisan tesisnya di Universitas Hasanuddin Makassar (2001) yang berjudul “*Konflik Maluku Utara (Kasus Konflik antar Kelompok di Ternate)*”. Penelitian ini menyoroti tentang kronologis peristiwa konflik, faktor-faktor penyebab konflik dan akibat yang ditimbulkan oleh konflik antar kelompok di Ternate. Penelitian kedua oleh Abubakar M. Nur, untuk tesisnya di Universitas Gadjadara (2005) yang berjudul “*Konflik dan Kekerasan antar Etnik di Malifut Maluku Utara)*”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor penyebab konflik dan kekerasan antar etnik, yaitu etnik yang mendiami pulau Halmahera (etnik Kao) dan etnik pendatang di luar Halmahera (etnik Makian). Konflik yang bernuansa sara di Maluku Utara tahun 1999 awalnya terjadi pada kedua etnik ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yanuarti, *et. al*, dari LIPI (2004) yang berjudul “*Konflik Maluku Utara: Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang*”. Memfokuskan pada struktur konflik yang terjadi di wilayah Maluku Utara pada tahun 1999-2000, yang meliputi isu yang dikonflikkan, karakteristik, hubungan antara kelompok-

kelompok yang berkonflik dan cara-cara yang digunakan. Karya ini memetakan akar permasalahan konflik dari sisi sosio historis, dengan segala dampak yang ditimbulkannya, baik dari sisi agama, adat, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, penelitian lainnya yang menyoroti tentang pendidikan multikultural dan masalah-masalah konflik di Indonesia, di antaranya: dilakukan oleh Bunyamin Maftuh untuk Disertasi di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2005) yang berjudul *“Implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas”*. Penelitian ini difokuskan pada: *Sejauhmana Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan pendekatan Workshp yang diintegrasikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas memberikan dampak yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam resolusi konflik*. Karya ini memudahkan penulis dalam memetakan konflik melalui resolusi konflik, khususnya yang dihadapi oleh siswa disekolah. Penelitian lain dilakukan Dadang Supardan untuk Disertasinya di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2004) yang berjudul *“Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimental Terhadap Siswa Sekolah Menengah Umum di Kabupaten Bandung)”*. Fokus penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol dengan diberikannya perlakuan pembelajaran sejarah yang berbasis multikultural dan perspektif sejarah lokal, nasional, global, dalam integrasi bangsa. Penelitian ini mengarah pada satu model pembelajaran sejarah yang mendukung optimalisasi integrasi bangsa yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masa sekarang maupun mendatang, karena dibangun atas dasar integrasi bangsa oleh masyarakat (*popular nations integration*) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan

masa kini dan mendatang. Karya ini lebih menitikberatkan pada pembelajaran multikultur dan interaksi antar etnik.

Penelitian yang dilakukan Isnarmi Moeis untuk Disertasinya di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2006) yang berjudul *“Kerangka Konseptual Multikulturalisme Transformatif Berdasarkan Pola Hubungan Konflik antar Etnik: Kajian Kritis terhadap Laporan Media Massa mengenai Konflik Ambon, Sambas, Sampit, dan Poso*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Grounded Theory* yang difokuskan pada penemuan pola hubungan-konflik antar kelompok etnik dalam masyarakat multikultural di Indonesia, dan penyusunan kerangka hipotetik multikultural yang sesuai dengan fenomena hubungan konflik tersebut. Objek kajian penelitiannya adalah berita mengenai konflik yang dilaporkan melalui media massa dan tulisan para pengamat (peneliti, praktisi, dan LSM) yang membahas tentang konflik yang terjadi di daerah. Karya ini sangat berguna bagi penulis untuk mengidentifikasi akar konflik pada masyarakat multikultural yang terjadi di daerah, khususnya di Maluku Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Nani I. Rajaloea untuk Tesisnya di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (2009) yang berjudul *“Pergeseran Nilai Masyarakat Pasca Konflik Etnik di Maluku Utara Implikasinya pada Integrasi Nasional (Studi Kasus di Kota Ternate)*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Penelitian ini hanya menempatkan konflik yang terjadi sebagai kasus tunggal penyebab pergeseran, dengan hanya melihat dan membandingkan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah konflik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, namun tidak menyinggung secara

detail tentang nilai-nilai yang ada dalam *adat se-atorang* sebagai unsur penguat integrasi komunitas di Kota Ternate yang sangat multikultural.

Begitu beragamnya komunitas di Kota Ternate, merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Selain etnik lokal yang oleh sebagian mengklaim sebagai penduduk asli Ternate, juga ada etnik Tidore, Makian, Kayoa, Tobelo, Galela, Sanana, dan lain-lain. Kota Ternate juga dihuni oleh beberapa etnik pendatang seperti; etnik Cina, Arab, Gorontalo, Manado, Bugis-Makasar, Jawa, Sumatera, Ambon, Papua, dan sebagainya. Fakta begitu multikulturalnya masyarakat yang ada di Kota Ternate, maka Kota Ternate, pantas disebut sebagai “kota lintas etnik”.

Dari penyebaran etnik yang beragam tersebut, maka Kota Ternate yang merupakan daerah bekas konflik horizontal, tentu dalam membangun daerah ini sering memunculkan *stereotype* dan sikap fanatisme yang berlebihan. Hal ini dibuktikan terutama pada “pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah” yang melibatkan kandidat dari berbagai identitas etnik. Dengan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap kandidat tertentu, membuka jalan bagi tumbuhnya konflik dalam masyarakat, mengabaikan nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik.

Dalam konteks ini, maka nilai-nilai seperti gotongroyong, toleransi, kekeluargaan, kekerabatan, dan kasih sayang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini bukan saja sebagai penguat bagi ikatan sosial dari komunitas, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan komunitas itu sendiri. Walaupun demikian, di antara nilai-nilai ini kemudian mengalami pergeseran, karena sebagian komunitas sikapnya lebih cenderung individual dan mementingkan diri dan kelompoknya sendiri, sehingga terasa ada yang hilang dari kehidupan sosial dalam komunitas di Kota Ternate. Dalam aspek pendidikan, terutama pendidikan IPS-Sosiologi, nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik pada

kenyataannya belum ditransformasikan di dalam kurikulum, terutama kurikulum muatan lokal. Hal ini juga memperkuat proses pergeseran nilai-nilai tersebut dalam kehidupan karena disamping tidak ditransformasikan di dalam kurikulum untuk tingkat pesekolahan, juga tidak dibelajarkan di dalam keluarga, dan di masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya dukungan dan kebijakan pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

Di samping itu, nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik terutama berada pada bidang kajian Sosiologi, Antropologi, dan PKN harus lebih diinternalisasikan pada keluarga, masyarakat dan persekolahan itu sendiri, karena inti dari bidang kajian ini menurut Sztompka (2007: v) adalah kajian tentang kebudayaan dan perubahan sosial. Harapan seperti ini relevan dengan kebijakan pengembangan bahan pembelajaran pendidikan IPS yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, di mana hal ini sejalan dengan paradigma baru dalam pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan budaya masyarakat lokal (Adimihardja, 2008: iv).

Dengan demikian, maka pendidikan IPS-Sosiologi mempunyai peran penting dalam membentuk jati diri dan identitas masyarakat Kota Ternate sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradab, karena pada dasarnya tujuan pendidikan IPS atau *sicial studies* adalah “...to help young people develop the ability to make informed and reasoned decision for the public good as citizens of a culturally diverse de,ocratic society in an independent world” (NCSS, 1994). Menurut Sumaatmadja (2004: 16-22) bahwa salah upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan IPS adalah melalui strategi pembelajaran yang berperspektif lokal. Selain itu, dijelaskan oleh Widja (1989: 10), kurikulum nasional sejak awal sudah memberikan porsi 20% bagi materi-materi muatan lokal yang tujuannya adalah agar peserta didik dalam

perkembangan dirinya sebagai insan Indonesia yang modern tidak tercerabut dari akar lingkungan sosial budayanya.

Uraian ini menunjukkan betapa pentingnya pembelajaran pendidikan IPS-Sosiologi sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Ternate sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu, nilai-nilai yang melekat pada masyarakat di Kota Ternate memiliki kesesuaian dengan nilai pendidikan IPS tentang pembentukan karakter yang kuat sebagai warga negara yang baik (*good citizens*), toleran, santun, dan beradab.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan IPS di sekolah saat ini belum sesuai harapan, karena secara kulikuler pendidikan IPS dimaknai sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang di organisasikan dan disajikan secara ilmiah dan paedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001: 92).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mendorong peneliti memilih topik “Pergeseran Nilai-Nilai Multikultural pada Hubungan Sosial antar Etnik Tiga Komunitas di Kota Ternate Pasca Konflik”. Hal ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: *pertama*, perlu dikaji dan dicarikan alternatif penyelesaiannya agar masyarakat kembali pada kehidupan yang mengutamakan toleransi, penghargaan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini pendidikan IPS-Sosiologi menjadi relevan untuk mengantar masyarakat menuju kesadaran akan identitas nasional tanpa melepaskan jati dirinya. Melalui pendidikan membuka kesadaran masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang datang dari luar, tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional atau lokal. Karena Pendidikan, termasuk Pendidikan IPS-Sosiologi penting untuk menjadikan nilai budaya lokal (*local genius*) menjadi landasan dalam pengembangannya. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa

manusia beserta nilai-nilai yang melekatnya padanya adalah merupakan sistem sosial yang harus terus dikembangkan dan diinternalisasi dalam pendidikan IPS-Sosiologi.

Kedua, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa guru IPS-Sosiologi dalam proses pembelajaran cenderung menyampaikan materi pelajaran yang terdapat dalam buku teks semata. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengajaran IPS masih berorientasi dan sarat dengan pengembangan keilmuan yang hanya bersifat teoritis dan konseptual saja (Al-Muchtar, 1991), serta belum banyak memanfaatkan lingkungan masyarakat sekitar sebagai sumber belajar (Kamarga, 1994). Berdasarkan pandangan ini, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam IPS-Sosiologi memiliki fungsi yang sangat sentral dan esensial bagi pengembangan dan ketercapaian tujuan pendidikan IPS di tingkat persekolahan. Sehingga pendidikan sosiologi yang bercirikan *meaningfull*, *integrative*, dan *active* dapat diwujudkan.

Ketiga, pengintegrasian nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik sangat diperlukan, karena pada dasarnya fokus dari pendidikan IPS adalah masyarakat. Sangatlah wajar jika dalam proses pendidikan IPS, para guru di sekolah mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang ada di Kota Ternate sebagai bagian dari materi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di dalam dan di luar kelas. Upaya ini diharapkan peserta didik akan mengenal budaya daerahnya, sehingga tumbuh rasa kebanggaan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang baik. Di samping itu peserta didik dapat memanfaatkan kekayaan nilai-nilai budaya daerah sebagai modal sosial dalam kehidupan, baik di lingkungan lokal, nasional, dan global. Proses ini diperlukan agar peserta didik dapat lebih membumi dan memahami kondisi lingkungan sosial tempat di mana mereka dapat tumbuh dan

berkembang, serta bersosialisasi dengan kehidupan yang lebih luas dengan orang lain, dengan etnik lain, dengan budaya lain, dan dengan agama lain.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik tiga komunitas di Kota Ternate pasca konflik?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik tiga komunitas di Kota Ternate pasca konflik?
3. Bagaimana pengaruh pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik tiga komunitas di Kota Ternate pasca konflik?
4. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik tiga komunitas di Kota Ternate pasca konflik?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji, menganalisis dan memetakan informasi tentang terjadinya pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik pasca konflik. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya merumuskan suatu kerangka konseptual masyarakat lokal dalam bingkai multikultural untuk kepentingan pelaksanaan proses pendidikan IPS secara umum dan pendidikan IPS-Sosiologi pada khususnya di Kota Ternate.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji dan menganalisis informasi argumentatif tentang pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik tiga komunitas di Kota Ternate pasca konflik, faktor

penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik, pengaruh pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik, untuk kemudian mencari bentuk solusi terbaik dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di persekolahan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini secara teoritik dapat menemukan dan merumuskan kerangka konseptual pengembangan nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik yang dijadikan landasan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi, jauh dari prasangka, konflik, intimidasi, dan bentuk-bentuk stereotip yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kerangka konseptual ini dikembangkan melalui pendidikan IPS pada umumnya dan khususnya pendidikan IPS-Sosiologi di Kota Ternate. Hal ini seperti dikemukakan oleh Fenton (1966) bahwa *social studies* atau IPS bukanlah studi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sekelompok bidang studi yang saling berhubungan yang meliputi Ilmu Politik, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Geografi, Antropologi dan Psikologi.

Secara praktis, temuan dalam peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Para akademisi yang bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai bahan masukan untuk pengembangan bidang ilmu sosiologi pendidikan, khususnya pada kajian-kajian tentang nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik dalam upaya membangun bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Ternate yang lebih berkeadaban.
2. Para praktisi untuk pengembangan tenaga kependidikan dan keguruan pada lembaga pendidikan tinggi (LPTK) yang bertugas menghasilkan lulusan tenaga guru Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang profesional.

3. Para pengemban kurikulum Pendidikan IPS, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, maupun lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Di mana sudah saatnya pendidikan IPS menjadi motor penggerak perubahan dan perbaikan karakter generasi bangsa yang toleran, santun dan saling menghargai.
4. Para pengambil kebijakan, agar dalam menentukan kebijakannya terutama yang terkait dengan masyarakat multikultural untuk pengembangan, pemberdayaan, perbaikan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang beragam etnik, agama, dan budaya. Sehingga diharapkan proses pembinaan masyarakat menjadi berkelanjutan, terintegrasi guna memperkecil sekat-sekat yang ada dalam masyarakat pasca konflik untuk menghindari konflik yang sama muncul kembali.

E. Definisi Istilah

Berbagai istilah yang dipergunakan sebagai judul dalam penelitian ini perlu diperjelas dengan pertimbangan: 1) menjernihkan pemikiran peneliti tentang masalah yang diteliti; 2) memudahkan pengkomunikasian temuan-temuan penelitian dan gagasan-gagasan yang dikembangkan secara akurat; 3) membatasi ruang lingkup penelitian dan pembahasan masalah, sehingga dapat meningkatkan derajat ketepatan penelitian yang dilakukan; dan 4) menjadi panduan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi terhadap berbagai temuan dalam penelitian.

1. Pergeseran Nilai-Nilai Multikultural

Pergeseran nilai-nilai multikultural yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini mengandung pengertian, terjadinya perubahan pola pikir, sikap, penghargaan, penerimaan masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya pergeseran nilai-multikultural pada hubungan sosial antar etnik ini membawa perubahan pada pola tindak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pergeseran nilai di sini mengarah pada nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dianut dan berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai luhur

yang ada pada masyarakat Ternate menurut Atjo (2009: 29-54) terutama dalam pola kehidupan sosial yang multikultural bersifat kekeluargaan, kekerabatan dan kegotongroyongan. Nilai-nilai seperti ini di dalam komunitas di Kota Ternate lebih di kenal dengan nilai-nilai dalam *adat se-atorang*. Nilai-nilai dalam *adat se-atorang* selama ini telah dianggap dapat mengatur ketertiban sosial dalam komunitas di Kota Ternate.

Nilai-nilai tradisional termasuk di dalamnya nilai-nilai religius selama ini telah dianggap sebagai warisan suci yang harus dipertahankan, karena perannya yang sangat besar dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi dengan invasi nilai-nilai budaya global, pola ini telah digeser menjadi transfer atau pemindahan nilai-nilai budaya global ke dalam lingkungan masyarakat tradisional. Nilai-nilai budaya global tersebut telah dianggap membawa kebaruan, modernitas, dan kemajuan bagi sebagian kehidupan masyarakat, disadari ataupun tidak sering berlawanan dengan nilai-nilai tradisional yang telah dianggap menjadi penguat ikatan sosial masyarakat.

Konsep multikultural dalam penelitian ini merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Stavenhagen (1986: 115), menurutnya konsep multikultural mengandung dua pengertian. *Pertama*, multikultural merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang majemuk; *kedua*, multikultural merupakan suatu keyakinan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya dalam masyarakat. Jadi dalam penelitian ini, nilai-nilai multikultural ditekankan pada nilai gotongroyong, nilai toleransi, nilai kekerabatan, nilai kekeluargaan, dan nilai kasih sayang.

2. Hubungan Sosial antar Etnik

Soekanto (2000: 66) menyatakan, perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan segi dinamikanya disebabkan karena warganya mengalami

hubungan satu dengan lainnya, baik dalam bentuk perseorangan maupun kelompok sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya proses sosial yaitu cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut.

Hubungan sosial antar etnik dikemukakan oleh Martodirdjo (2000: 9) masing-masing ditandai oleh spesifikasi dalam proses kontak sosial yang terjadi, yaitu akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan interaksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akulturasi terjadi jika dua kelompok etnik mengadakan kontak dan saling mempengaruhi. Dominasi terjadi jika suatu kelompok etnik menguasai kelompok lain. Paternalisme yaitu merupakan hubungan antar kelompok etnik yang menampakkan adanya kelebihan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, tanpa adanya unsur dominasi. Pluralisme merupakan hubungan yang terjadi di antara sejumlah kelompok etnik yang di dalamnya mengenal adanya pengakuan persamaan hak politik dan hak perdata bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan. Sedangkan integrasi adalah pola hubungan yang menekankan persamaan dan bahkan saling mengintegrasikan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Pola-pola hubungan itu hanya terjadi apabila orang perorang atau kelompok-kelompok manusia saling bekerja sama, saling berbicara untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor yang memudahkan terjadinya hubungan sosial dalam masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya, menurut Soekanto (2000: 90) adalah:

- (1) sikap toleransi di antara kelompok-kelompok yang berada dalam suatu masyarakat;
- (2) kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi;
- (3) sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing;
- (4) sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan sosial;
- (5) pengetahuan akan persamaan unsur-unsur dalam kebudayaan masing-

masing kelompok melalui berbagai penelitian kebudayaan khusus (*subcultures*); (6) melalui perkawinan campuran antar berbagai kelompok yang berbeda kebudayaan, dan (7) adanya ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada mencari suatu kompromi agar dapat bersama-sama menghadapi musuh dari luar yang membahayakan masyarakat.

3. Komunitas

Komunitas merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang secara khusus berasal dari suatu sistem sosial. Konsep komunitas menurut Bertrand (1974: 149-150) adalah sebagai berikut:

- a. Komunitas adalah suatu sistem sosial yang meliputi sejumlah struktur sosial yang tidak terlembagakan dalam bentuk kelompok atau organisasi untuk pemenuhan kebutuhannya melalui hubungan kerja sama struktural;
- b. Komunitas adalah unit struktur sosial yang terkecil dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri;
- c. Komunitas dapat berdiri sendiri dalam hubungan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Menurut Soenarno (2002) bahwa komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial-ekonomi. Di samping itu, secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya, serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

Dikatakan oleh Conyers (1990: 190-192) bahwa komunitas adalah suatu kelompok yang mengadakan kontak secara langsung (*face to face*) dipersatukan atau

diikat oleh nilai-nilai serta objektivitas masing-masing dengan suatu keseluruhan dasar (*basic harmony*) dalam hal minat dan aspirasi. Menurutnya terdapat tiga kriteria yang dipenuhi dalam memahami komunitas, yakni:

pertama, konsep komunitas memiliki komponen-komponen tertentu yang saling mengadakan interaksi. Interaksi di antara anggota komunitas disebabkan adanya saling ketergantungan ekonomis, hubungan sosial, atau eksistensi beberapa bentuk organisasi politik. *Kedua*, anggota komunitas pada umumnya memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya indentifikasi mereka sebagai sebuah kelompok. Ciri khas semacam ini sangat bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tetapi faktor bahasa, kesukuan, atau daerah asal, agama, kultur, pola dan sikap hidup biasanya merupakan faktor-faktor yang sangat bernilai. *Ketiga*, suatu komunitas memiliki keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi. Hal ini menandakan bahwa anggota komunitas cenderung untuk memiliki pola pikir dan sikap hidup yang sama terhadap pembangunan di masa depan.

4. Konflik

Dalam penelitian ini, konflik lebih dilihat sebagai suatu situasi yang melahirkan berbagai perubahan yang ada dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Coser dalam bukunya yang berjudul "*The Functions of Social Conflict* (1956: 80), mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena konflik, mulai dari pertikaian antarpribadi, melalui konflik kelas sampai peperangan internasional. Coser kemudian tidak mengkontruksi teori umum tentang konflik, Ia hanya berusaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial serta mengkonsolidasikan skema konsep itu, sesuai dengan data yang berlangsung dalam konflik sosial tersebut. Coser menyatakan, bahwa para ahli sosiologi sering mengabaikan konflik sosial dan cenderung menekankan pada sisi yang negatif. Coser menyatakan bahwa konflik bersifat fungsional dan disfungsional bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Konflik menurutnya mempunyai dua wajah, *pertama*, dapat

25

Irwan Djumat, 2013

Pergeseran Nilai-Nilai Multikultural Pada Hubungan Sosial Antar Etnik Tiga Komunitas di Kota Ternate Pasca Konflik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial; dan *kedua*, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Dikemukakan oleh Pruitt dan Rubin (2009: 14-17) dari sisi positif, konflik dapat menghasilkan *pertama*, persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial; *kedua*, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan dan melahirkan kesepakatan yang bersifat integratif; *ketiga*, konflik dapat mempererat kesatuan kelompok. Sementara dari sisi negatif, konflik dapat melahirkan *pertama*, taktik *contentious* (pertengkaran) yang pada awalnya relatif ringan, bersahabat, dan tidak bersifat ofensif, cenderung membuka jalan bagi tindakan yang lebih berat; *kedua*, jumlah masalah yang timbul menjadi meningkat; *ketiga*, fokus yang pada awalnya bersifat khusus dapat melebar dan lebih global; *keempat*, jumlah pihak yang berkonflik cenderung meningkat, sekali konflik mulai mengalami eskalasi maka transformasi yang menyertainya akan sulit untuk dieskalasikan.

F. Sistematika Penulisan

Kajian dalam disertasi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah untuk mempertegas judul penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka, yang memuat tentang *theory* dan konsep utama yang mendasari penelitian: *middle range theory*, *interpretatif understanding (verstehen)*, perspektif mikrososial, dan teori tentang multikultural; nilai-nilai multikultural dalam komunitas; sistem nilai budaya dan konflik nilai dalam komunitas; nilai-nilai multikultural dalam komunitas antar etnik; nilai-nilai multikultural, asimilasi, dan akulturasi; nilai-nilai multikultural dan pluralisme; hubungan sosial antar etnik dalam komunitas, hubungan sosial sebagai wadah terbentuknya solidaritas antar etnik;

hubungan antar etnik dan prasangka sosial dalam komunitas; dominasi hubungan antar etnik dalam komunitas; nilai-nilai multikultural pada hubungan antar etnik dalam pendidikan IPS, dan teori yang melandasi Sosiologi pendidikan dalam pendidikan IPS.

Bab III. Metodologi Penelitian, yang berisikan metode dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, penentuan subjek dan sumber data penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta analisis data dan penyajian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat temuan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian yang berisikan tentang pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik, faktor penyebab pergeseran, pengaruh pergeseran, dan bentuk solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai multikultural pada hubungan sosial antar etnik.

Bab V. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang memuat kesimpulan, implikasi penelitian dan rekomendasi yang berisikan: untuk penguatan pembelajaran dalam pendidikan IPS-Sosiologi, untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat multikultural yang ada di Kota Ternate, untuk peneliti berikutnya, dan untuk masyarakat secara umum.